

MEDIA, NASION, DAN SEJARAH

Ariel Heryanto

Suatu hari di akhir dekade 1980-an, saat Orde Baru masih berjaya, saya terlibat dalam sebuah obrolan santai dengan seorang sahabat non-Indonesia yang ahli tentang Indonesia. Dari jarak ribuan kilometer di luar wilayah Indonesia, kami memperbincangkan nasib sejumlah kasus penindasan dan sensor oleh penguasa di tanah air. Di ujung obrolan yang melelahkan batin semacam itu, muncul sebuah angan-angan yang wajar: apa yang terjadi jika Orde Baru sudah ambruk dan menjadi sebuah bangkai? "Wah, bisa dibayangkan," kata teman saya, "betapa hebat ledakan informasi dan energi yang selama ini tertindas di bawah kekuasaan sensor".

Orde Baru sudah ambruk, walau mungkin belum menjadi sepotong bangkai. Rasanya ia masih hadir dan sibuk di sekitar kita. Seandainya ia sudah mati maka pasti arwahnya sudah hadir lagi sebagai drakula atau jin yang bergentayangan dan usil. Jika diungkapkan dalam bahasa Orde Baru: "bahaya laten Orde Baru" masih luar biasa kuatnya. Namun angan-angan sahabat saya dari tahun 1980-an tidak sepenuhnya meleset. Telah terjadi "ledakan" informasi dan energi yang selama bertahun-tahun ditindas menjelang dan terlebih lagi sesudah ambruknya kepresidenan Suharto.

Di saat rupiah tiarap ke bumi, dan batin sebagian besar bangsa Indonesia menciut karena berbagai kekerasan primordial yang berkepanjangan, media massa Indonesia bangkit meledak-ledak. Seperti dikatakan oleh Stanley, wartawan AJI dan aktivis ISAI, di saat banyak orang kehilangan pekerjaan karena krisis ekonomi, industri media massa membuka lowongan kerja dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya (Stanley, 1999: 92). Tetapi seperti banyak praktisi dan pengamat lain, Stanley tidak menilai perkembangan mutakhir ini semata-mata sebagai sebuah kabar gembira. Menurutny, pers Indonesia masih berjalan (atau "meledak", jika kita masih mau mempertahankan istilah ini) di tempat. Berbagai huru-hara dan warna-warni produksi informasi masal di tanah air, tidak diikuti dengan peningkatan kualitas produksi maupun konsumsi dan regulasinya.

Mungkin kita harus mengatakan peningkatan kualitas itu *belum* terjadi secara berimbang dengan ledakan kuantitas produksi, sirkulasi, dan konsumsi informasi. Moga-moga ia *akan* dan *sedang* berkembang ke arah itu. Sebagaimana halnya dengan sejumlah pranata sosial lain, media massa kita masih kaget-kagetan dengan sejarah baru yang boleh disebut pasca-Orde Baru. Dari segi waktu, proses perubahan ini masih belum cukup lama, sedangkan dari segi bobot, perubahan sosial sejak tahun 1997 di tanah air telah sedemikian dahsyat. Ada sejumlah dendam, bercampur aduk dengan kerinduan, kelegaan, harapan, dan sekaligus kekhawatiran yang baru terlepas ke udara terbuka (lihat lebih jauh tulisan Leen D'Haenens, Effendi Gazali, dan Chantal Verelst, dalam buku ini).

Setiap penciptaan yang indah selalu berawal dengan kekacuan yang luar biasa. Terciptanya janin di rahim, seorang teman saya pernah berbisik, diawali dengan kerusakan di tubuh ibunda sehingga ia muntah muntah. Penciptaan jagad raya, kata teman lain, diawali dengan kekacauan alam yang luar biasa. Anda tak bisa menggoreng telur, kata Mao, jika takut memecah telur. Para pejuang nasionalis Indonesia tidak akan kesulitan memahami urutan sejarah itu: kemerdekaan terlahir dari sebuah keporakporandaan. Celaknya, tidak ada hukum yang pasti dalam sejarah. Banjir darah tahun 1965/66 menghantar terbentuknya Orde Baru yang juga punya bakat sebagai Orde Kekerasan, Penindasan, Pembunuhan, Perkosaan, Pembredelan, Penggusuran demi kebahagiaan dan

keindahan sebagian kecil elite keberanian berdiri berbeda dan menunjuk kekacauan ini, walaupun harus sembunyi-sembunyi, harus diakui ditunjukkan oleh pengelola pers bawah tanah (lihat tulisan Victor Menayang, Bimo Nugroho, dan Dina Listiorini dalam buku ini).

Apakah peningkatan kualitas komunikasi massa di forum publik Indonesia akan terjadi dengan berdetaknya waktu? Berapa lama lagi? Bagaimana proses itu bergulir? Apa yang dapat kita lakukan untuk mempercepatnya? Tidak ada jawaban yang mudah dan pasti untuk semua pertanyaan ini. Tetapi juga tidak ada alasan untuk menghindari dan tidak mencoba menawarkan jawaban. Itu sebabnya, berbagai publikasi yang diusahakan selama beberapa tahun terakhir oleh lembaga seperti ISAI (Institut Studi Arus Informasi) atau LSPP (Lembaga Studi Pers dan Pembangunan) pantas dihargai. Pengharaan serupa layak diberikan kepada para individu peneliti yang secara serius memberikan sumbangan dalam buku ini. Jelas mereka tidak saling bersepakat dalam semua hal. Dan jelas tidak semua pembaca buku ini akan menelan mentah-mentah apa yang tampil di halaman-halaman berikut. Bagaimanapun juga, para penulis di buku ini membantu mengurai berbagai simpul dalam kompleksitas masalah media massa Indonesia di masa pasca-Orde Baru.

Berbeda dari studi akademik di bidang-bidang seperti ekonomi, politik, sejarah atau kebudayaan yang terlanjur dominan di kalangan ahli asing dan berpusat di luar Indonesia, studi dan publikasi tentang media massa Indonesia masih lebih berpusat di tanah air sendiri. Kita juga beruntung, dari sedikit ahli asing tentang ini, para peneliti terkemuka seperti Krishna Sen dan David Hill adalah akademikus yang meneliti tidak hanya dengan hati-hati, cerdas, dan teliti, tetapi juga dengan simpati yang dewasa bagi Indonesia. Catatan ini saya susun beberapa hari setelah peluncuran buku mereka yang berjudul *Media, Culture, and Politics in Indonesia* (Sen dan Hill, 2000) oleh Wimar Witoelar di Melbourne, Juli 2000. Berbeda dari kebanyakan karya asing tentang Indonesia yang tiba-tiba muncul setelah munculnya krisis ekonomi 1997 dan runtuhnya Orde Baru 1998, buku ini menggambarkan seluk-beluk media massa Indonesia sebagai sesuatu yang dinamis dan terkait erat dengan hal-hal yang biasanya dianggap terpisah, misalnya politik dan kebudayaan. Bab yang ditulis bersama oleh Andrew Jacobowicz dan Rod

Palmer dalam buku ini memperkaya pemahaman kita tentang dinamika serupa di negeri tetangga. Dengan latar demikian dapatlah dipahami frustrasi yang pernah dialami oleh pejabat lembaga perwakilan RI di luar negeri seperti yang dikisahkan oleh Mahendra Siregar dalam sebuah bab terpisah.

Para penulis Indonesia—seperti penulis lain—biasanya lebih peka dan tanggap terhadap gejala di tanah airnya sendiri. Keistimewaan itu tampak dalam di buku ini. Namun sulit untuk menyangkal bahwa kita tidak serba bisa dalam semua hal. Misalnya, dalam hal teori kita masih terus berhutang jasa kepada pemikiran sarjana asing, khususnya mereka yang buku-bukunya lebih mudah kita gapai dalam perjalanan studi atau karier profesional kita. Perjalanan intelektual itu sendiri biasanya bukan sebuah pilihan yang sepenuhnya merdeka dan sadar. Ia merupakan sebuah kemewahan nasional yang kita terima sebagai hadiah langka dari orang atau lembaga lain dalam bentuk beasiswa. Dalam berbagai publikasi lain di tanah air tentang media massa, seperti yang dihasilkan oleh para sarjana ilmu komunikasi dalam bentuk skripsi, analisis-isi menjadi model penelitian yang dominan. Studi semacam itu kadang-kadang lebih pantas disebut studi sosiologi media massa atau studi politik dengan memanfaatkan data dari penampilan formal media massa, ketimbang studi tentang media massa.

Lemahnya studi media dan kajian teori tentang kebudayaan pada umumnya memberikan jalan mulus bagi dominasi studi politik dan ekonomi atas media massa. Di situ media massa dianggap sebagai barang mati. Ia tak lebih daripada sebuah "alat" propaganda politik penguasa untuk menindas rakyat, atau "alat" propaganda tandingan di tangan kaum oposisi untuk melawan tirani penguasa. Dengan kata lain, ia mirip senapan bagi tentara, batu bagi demonstran. Kritik yang dilontarkan oleh Harsono tentang bahasa sebagai kekuatan sosial tersendiri layak mendapat perhatian lebih jauh daripada yang disinggungkannya selintas di buku ini (lihat "Komunikasi Politik dan Kredibilitas Media Menjelang Jatuhnya Soeharto"). Kalau bukan dibahas sebagai alat propaganda, media massa dibahas oleh banyak pihak lain tak lebih daripada sebuah komoditi, barang dagangan. Ia mirip sabun mandi, sandal jepit, atau pisang goreng.

Sebuah kesan tentang minimnya kajian teoretis atau ketergantungan pada teori dan teoretikus asing masih membayangi kumpulan tulisan di buku ini. Tetapi pantas dicatat, tidak sedikit tulisan dalam buku ini yang mengajukan sejumlah data segar yang pantas menantang imajinasi dan pemikiran ulang kita tentang teori sosial atau media di Indonesia. Sejumlah tulisan lain mengacu pada teori dan teoretikus asing sebagai sebuah ajakan untuk membenteng perdebatan teoretis di kalangan sesama pengamat media massa di Indonesia. Dengan kata lain, buku semacam ini dapat menjadi bahan acuan—tidak harus dengan memuji atau membenarkan—untuk sebuah perdebatan yang lebih teoretis di tanah air tentang media massa dan perubahan sosial. Dengan munculnya lebih banyak buku semacam ini, moga-moga, kita bisa saling mengacu dan mendewasakan pemahaman konseptual dan kajian teoretis kita.

Persoalannya bukan kita harus membuat teori tersendiri tentang media massa, tetapi bagaimana kita dapat memanfaatkan teori siapa saja dan dari mana saja untuk memperkaya perdebatan teoretis di tanah air. Persoalannya bukan menghindari atau menyensor teori asing, tetapi memetik dan mengolahnya untuk menjadi bagian yang organik dan menyehatkan kerja penelitian kita sendiri di tanah air.

Pentingnya wawasan teoretis untuk kajian media di tanah air tidak perlu diuraikan panjang-lebar lagi di sini. Dalam bentuk yang paling kasat mata, secara teknis praktis, Indonesia saat ini sedang menyajikan limpahan berbagai peristiwa, pernyataan, dan gejala yang berubah-ubah, kadang-kadang serba tak terduga dan kadang-kadang membingungkan. Kita akan teramat sibuk, mungkin terlalu sibuk, jika semata-mata mencoba mengumpulkan dan menumpuk informasi tentang apa saja yang terjadi di permukaan peristiwa yang kaya warna dan suara. Sebelum kita sempat mencatat secukupnya sebuah peristiwa di ujung sebuah kota, aneka peristiwa lain meledak-ledak di kota lain. Ini menyangkut berbagai kehidupan sosial, dan dinamika perubahan media massa menjadi bagian darinya.

Tanpa kerangka teori yang memadai, kita tidak berdaya menyerap berbagai peristiwa itu. Atau, jika ada teknologi informasi yang mampu membantu kita, berbagai timbunan informasi yang terhimpun akan menjadi seonggok data yang mati (sejumlah nama, angka atau istilah,

dan kutipan pernyataan orang). Atau berbagai data itu terlalu cepat menjadi basi karena makna sebuah peristiwa dengan cepat ditiadakan atau dibantah oleh berbagai peristiwa berikutnya yang berlangsung dengan sangat cepat dan gencar.

Sebuah contoh problematika teoretis mungkin perlu dikemukakan untuk memperjelas tantangan kita saat ini. Ledakan informasi dan hiruk-pikuk pertumbuhan media massa di Indonesia saat ini berlangsung bersamaan dengan menjadi-jadinya kekerasan politik di berbagai wilayah tanah air, baik yang disponsori oleh unsur-unsur alat negara mau pun yang sepenuhnya swasta. Bukan sebuah kebetulan jika ISAI memusatkan perhatian dan kerja publikasinya pada dua tema itu: media alternatif dan kekerasan politik. Tetapi tidak banyak di antara kita yang mencoba mendalami kaitan teoretik antara kedua hal itu. Beberapa penelitian yang sudah lazim diterbitkan mengamati bagaimana media massa menampilkan kekerasan di tanah air. Dengan kata lain, kekerasan dipahami hanya sejauh sebagai "isi" liputan jurnalis dalam sebuah studi analisis-isi. Tetapi bagaimana sebaliknya: media massa menjadi "isi" sebuah kekerasan, dan kekerasan sebagai sebuah "media massa" (lihat Heryanto, 2000: 74–5)? Atau yang lebih jauh lagi, apa arti kombinasi ledakan media plus kekerasan politik dalam proses sejarah sosial bangsa ini saat ini?

Hampir dua puluh tahun lalu Benedict Anderson (1983) melontarkan sebuah teori tentang asal-usul terbentuknya sebuah ikatan sosial bernama "nasion" (yakni sebuah komunitas yang diangankan) dan penyebarannya di berbagai wilayah dunia, termasuk Indonesia. Berkat angan-angan nasion itu, berjuta-juta orang di seantero jagad bukannya siap membunuh tetapi terbunuh demi sang angan-angan modern itu. Walau tidak sepenuhnya orisinal, teori Anderson menekankan dengan cara yang sangat canggih dan meyakinkan bagaimana pembentukan nasion tidak terlepas dari pertumbuhan pers dan industri cetak-mencetak. Dengan kata lain, seandainya hingga di abad ini belum ada yang menemukan teknologi mesin cetak, barangkali sejarah dunia juga belum mengenal sebuah ikatan sosial yang mendunia dan disebut nasion.

Bagi orang Indonesia di masa ini, mempertimbangkan teori itu lalu dipisahkan dari novel-novel semi sejarah karya Pramoedya Ananta Toer

yang menggambarkan secara gamblang kaitan antara pertumbuhan pers dan pembentukan angan-angan komunitas bernama "bangsa Indonesia" (Toer, 1980a, b; 1985, 1988). Tidak kebetulan bahwa perintis nasionalisme adalah juga mereka yang menjadi perintis pers di tanah jajahan Hindia Belanda. Mungkin juga tidak kebetulan bila lagu kebangsaan nasional "Indonesia Raya" diciptakan orang yang bekerja di pers, dan disiarkan kepada khalayak luas untuk pertama kalinya lewat pers bertajuk *Sin Po*.

Cuplikan sejarah dan teori itu sengaja dipilih untuk sekadar mempertanyakan apa yang terjadi sekarang di Indonesia. Kita menyaksikan dua hal sekaligus. *Pertama*, sebuah ledakan industri liberal pers yang kaget-kagetan karena terlepas dari penindasan otoriterisme selama lebih dari tiga dekade. *Kedua*, serangkaian peristiwa kekerasan antarsesama warga-bangsa yang memporak-porandakan angan-angan komunitas kebangsaan, paling tidak bagi sebagian kecil dari anggota nasion ini. Benarkah ada kaitan antara industri serta perkembangan pers dan menguat atau melemahnya ikatan solidaritas nasionalistik? Kalau ada, apakah sifat kaitan itu? Laten atau niscaya? Apakah ia sangat bergantung pada sejumlah "kebetulan" konteks sejarah, dan tidak akan terjadi kalau tidak ada konteks yang "kebetulan" pas? Apakah teori Anderson masih dapat atau perlu dianggap penting? Atau perlu dikomentari dan disempurnakan? Bagaimana persisnya?

Bagaimanapun juga, isu de-sentralisasi dan diskusi federalisme di masa pasca-Orde Baru bertumpang tindih atau bersinggungan dengan masalah de-nasionalisasi dan de-nasionalisme di samping globalisasi. Kajian Jeffrey Winters tentang internet dapat dibaca sambil mempertimbangkan tulisan tentang koran dan radio lokal yang ditulis oleh Effendi Gazali. Pada akhirnya perubahan sosial—juga yang terjadi di Indonesia—bukan sekadar perubahan angka, lembaga, peraturan dan kebijakan formal; bukan sekadar perubahan "isi" liputan jurnalistik yang dapat dipahami dengan kerangka teori dan konsep sosiologi yang terlanjur dominan. Berbagai perubahan ini juga menggugat kesadaran lama dan menggoda terbentuknya kesadaran baru tentang ruang, waktu, aktivitas sehari-hari, kuasa, identitas diri, serta solidaritas sosial.

Perubahan sosial yang terjadi di Indonesia mengajak kita untuk

mempertanyakan sejumlah persoalan teoretis politik, ekonomi, dan kebudayaan secara makro yang berkait dengan industri media massa. Hal ini tampaknya ditangkap dengan baik oleh insting politik Budiman Sudjatmiko maupun Ishadi S.K. yang mereka tulis dalam dua tulisan yang berbeda. Uraian Satrio Arismunandar yang sangat informatif dan menggugah dan analisa kritis dan makro oleh Dedy N. Hidayat mengajak kita untuk menengok lebih jauh teori-teori Marxian atau Neo-Marxian dalam memahami kemungkinan, peluang, hambatan ekspansi modal global, dan perlawanan para pekerja dalam produksi industri media. Tulisan Sri Mulyani Indrawati, dan sebuah tulisan lain yang ditulis bersama oleh Muhammad Chatib Basri dan Dana Iswara melengkapi pemahaman kita tentang konteks ekonomi dari pokok permasalahan tersebut.

Berbagai sumbangan yang tertuang dalam buku ini menjadi salah satu dari sebuah proses mencair yang sedang mengalir dengan deras. Kesaksian seperti ini akan mudah lenyap tertelan sejarah jika tidak direkam oleh penerbitan semacam ini. Dengan berkat kerja keras para penyuntingnya yang didera arus pergolakan sosial yang sama, sebagian dari proses bersejarah itu kini mendarat di hadapan kita.

Referensi

- Anderson, Benedict. 1983. *Imagined Communities*, London: Verso.
- Heryanto, Ariel. 2000. "Perkosaan Mei 1998: Beberapa Pertanyaan Konseptual". Dalam *Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Nur Immanuel bono (penyunting). Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, hlm. 57-97.
- Sen, Krishna dan Hill, David T. 2000. *Media, Culture and Politics in Indonesia*, Melbourne: Oxford University Press.
- Stanley. 1999. "Media: Antara Euforia dan Demokrasi". Dalam *Almanak Parpol Indonesia*. Julia Suryakusuma dkk. (penyunting). Jakarta: API, hlm. 91-98.
- Toer, Pramodya A. 1980a. *Bumi Manusia*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Toer, Pramodya A. 1980b. *Anak Semua Bangsa*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Toer, Pramodya A. 1985. *Jejak Langkah*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Toer, Pramodya A. 1988. *Rumah Kaca*. Jakarta: Hasta Mitra.

JURNALIS, KEPENTINGAN MODAL, DAN PERUBAHAN SOSIAL

Dedy N. Hidayat

Kerangka analisis yang digunakan sebagai acuan sistematika dalam merangkai tulisan-tulisan dalam buku *Pers dalam "Revolusi Mei"* ini sebenarnya dengan jelas telah memperlihatkan bahwa kajian terhadap pers, serta perubahan yang terjadi padanya, justru harus dilakukan dengan terlebih dahulu mengesampingkan pers dari fokus kajian. Artinya, pers pertama-tama harus diletakkan dalam totalitas sosial yang lebih luas, sebagai bagian integral dari proses-proses ekonomi, sosial, dan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Teks isi media beserta tindakan jurnalis dalam memproduksinya tidak terlepas dari konteks proses-proses sosial memproduksi dan mengkonsumsi teks, baik pada jenjang organisasi, industri, dan masyarakat. Namun institusi pers, struktur industri media, dan interaksi antara pers dan berbagai kelompok sosial, yang muncul dalam proses memproduksi dan mengkonsumsi teks isi media, perlu pula dipahami sebagai bagian dari proses yang berlangsung dalam struktur politik otoritarian dan ekonomi kapitalis yang secara spesifik tercipta selama era Orde Baru. Akhirnya, struktur ekonomi-politik Orde Baru itu sendiri juga perlu diamati sebagai suatu entitas yang telah terintegrasi dalam jalinan struktur yang lebih makro,